

ABSTRAK

Noor Sipa Maulida, 240211050166, *Perspektif Masyarakat Dalam Pagar tentang Wali Mujbir terhadap Perjodohan*, dibawah bimbingan I: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk dan bimbingan II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Perspektif, Wali Mujbir, Perjodohan

Penelitian ini membahas mengenai perspektif masyarakat Desa Dalam Pagar tentang wali mujbir terhadap perjodohan di era kontemporer. Latar belakang penelitian ini berangkat dari salah satu kewenangan yang dimiliki wali mujbir, yaitu hak *ijbar* (memaksa) untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan penuh dari anak perempuannya, yang secara hukum Islam bertujuan melindungi kepentingan anak perempuan. Namun, dalam praktik sosial, hak tersebut kerap disalahartikan sebagai legitimasi pemaksaan pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga dan perceraian, khususnya pada generasi muda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat di Desa Dalam Pagar tentang wali mujbir dalam pernikahan di era kontemporer serta relevansi hak wali mujbir terhadap praktik perjodohan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar dengan wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Dalam Pagar. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dalam Pagar masih mengakui eksistensi hak wali mujbir sebagai bagian dari ajaran fikih Islam yang memberikan kewenangan kepada ayah atau kakek sebagai wali nasab dalam perkawinan anak perempuan. Namun, praktik hak *ijbar* tidak lagi diterapkan secara mutlak. Masyarakat lebih mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan persetujuan calon mempelai perempuan dalam penentuan pasangan hidup. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan dan pelaksanaan hak wali mujbir dari otoritas yang bersifat memaksa menuju fungsi perlindungan, bimbingan, dan pertimbangan kemaslahatan keluarga yang selaras dengan perkembangan sosial masyarakat kontemporer.

ABSTRACT

Noor Sipa Maulida, 240211050166, *The Perspectives of the Dalam Pagar Village Community on Wali Mujbir in Arranged Marriage*, supervised by Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk as Supervisor I and Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA as Supervisor II, Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Keywords: Perspective, Wali Mujbir, Arranged Marriage

This study examines the perspectives of the people of Dalam Pagar Village on *wali mujbir* in relation to arranged marriage in the contemporary era. The study is motivated by one of the authorities granted to a *wali mujbir*, namely the right of *ijbar*, which refers to the authority to arrange the marriage of a daughter without her full consent. In Islamic law, this authority is intended to protect the best interests of the daughter. However, in social practice, this right is often misunderstood as a justification for forced marriage, potentially leading to marital conflict and divorce, particularly among the younger generation.

This study aims to analyze the perspectives of the people of Dalam Pagar Village regarding *wali mujbir* in marriage in the contemporary era and to examine the relevance of the *wali mujbir*'s authority to the practice of arranged marriage. This research employed an empirical legal research method with a sociological approach. Data were collected through field research conducted in Dalam Pagar Village, Banjar Regency, using semi-structured in-depth interviews and documentation. The research participants were members of the Dalam Pagar Village community. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model.

The findings reveal that the people of Dalam Pagar Village continue to recognize the existence of *wali mujbir* as part of Islamic *fiqh*, which grants the father or paternal grandfather the authority to act as the legal guardian (*wali nasab*) in the marriage of a daughter. However, the practice of *ijbar* is no longer applied in its absolute form. Instead, the community prioritizes communication, deliberation, and the consent of the prospective bride in the process of selecting a spouse. The study further finds a shift in the interpretation and implementation of the authority of *wali mujbir*, from a coercive authority toward a function centered on parental protection, guidance, and the promotion of family welfare, in line with the social developments of contemporary society.